BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian di Indonesia dalam lima tahun terakhir menjadi sorotan dunia termasuk *IMF (International Monetary Fund)* yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki proyeksi ketahanan ekonomi yang baik (Kontan, 2018). Perekonomian Indonesia meningkat cukup tinggi, hal ini tercermin pada PDB triwulan II tahun 2018 yang bertumbuh sebesar 5,27 persen *year on year (yoy)*, pencapaian tertinggi sejak tahun 2013 (BI, 2018).

Kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh permintaan domestik dari konsumsi swasta dan pemerintah. Meningkatnya pertumbuhan dari permintaan domestik tersebut kemudian berdampak pada tingginya pertumbuhan impor, di tengah kinerja ekspor yang relatif terbatas. Atas dasar hal tersebut Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2018 akan tetap kuat didorong permintaan domestik (BI, 2018).

Dalam keterangan resmi Bank Indonesia tersebut, dijelaskan bahwa *IMF* menilai Indonesia memiliki tiga peluang untuk mengakselerasi perekonomian dalam jangka panjang. Pertama, mengoptimalkan manfaat bonus demografi hingga tahun 2030. Kedua, memanfaatkan perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia. Ketiga, memanfaatkan siklus ekonomi dunia, termasuk momentum transformasi ekonomi struktural China dalam rangka meningkatkan ekspor. (Kontan, 2018)

Untuk itu, Indonesia perlu mengatasi beberapa tantangan struktural seperti meningkatkan sumber daya manusia (SDM) terutama terkait pendidikan, serta mengubah struktur ekspor. Penyesuaian tersebut antara lain mengubah komoditas sumber daya alam (SDA) dan produk lainnya yang menggunakan teknologi rendah ke sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi. (Kontan, 2018)

Upaya peningkatan perekonomian Indonesia ini perlu dimanfaatkan untuk pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Hal ini mendasari pertimbangan kebijakan ekonomi pemerintah yang berfokus pada

peningkatan produktivitas domestik melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau lebih dikenal dengan singkatan UMKM.

Menurut UU No. 20 tahun 2008, UMKM merupakan golongan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki/ dikuasai yang memenuhi kriteria yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Tabel 1.1. Kriteria UMKM

No	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012

Berdasarkan Pedoman Umum, Pedoman Teknis, dan Modul (PTK) untuk UMKM, usaha mikro mewakili usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara, usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Usaha mikro dapat meliputi usaha perorangan dan badan usaha perorangan, sedangkan usaha kecil meliputi usaha

perorangan dan badan usaha, baik badan usaha yang merupakan badan hukum maupun badan usaha yang bukan badan hukum.

UMKM di Indonesia merupakan potensi kekuatan ekonomi nasional yang perlu dijaga dan ditingkatkan. Selain menyumbang sekitar 60 persen pada PDB nasional, UMKM juga dapat menyerap banyak tenaga kerja, dan menarik investasi (Rijanto, 2016). Kontribusi sektor UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama. (Kemenperin, 2018)

Kekuatan UMKM terletak pada kemampuan fokus yang spesifik, fleksibilitas nasional, biaya rendah, dan kecepatan inovasi. Sektor produktif UMKM dapat mempekerjakan lebih dari 107,6 juta penduduk Indonesia dan berkontribusi 60,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Potensi ini diperkuat dengan keberadaan UMKM yang tersebar di seluruh penjuru negri dan menguasai sekitar 99 persen aktivitas bisnis di Indonesia, dengan kontribusi sebesar 98 persen berasal dari usaha mikro. (Kompas, 2018)

Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan PDB dan serapan tenaga kerja meningkat, akses sektor UMKM ke rantai pasok produksi global *(Global Value Chain)* masih sangat rendah (Rijanto, 2016). Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya sebanyak 0,8 persen. Ini menunjukkan bahwa pengembangan usaha besar belum melibatkan kontribusi dari UMKM.

Dibandingkan dengan negara *ASEAN* lainnya, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya mencapai 2,7 persen. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3 persen terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013. Sementara, kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya sebesar 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara lannya. (Kemenperin, 2018)

Di tingkat Asia Tenggara, kontribusi UMKM dikuasai oleh Thailand sebesar 29,5 persen dan Filipina 20 persen. Sementara di tingkat internasional, kontribusi

UMKM dikuasai Jerman sebesar 55,9 persen dan Jepang sebesar 53,8 persen. Untuk mengejarnya, Indonesia perlu mendesain sektor formal agar bisa menyerap tenaga kerja lebih optimal, dan menyiapkan UMKM agar makin berdaya saing terhadap negara-negara lainnya di masa yang akan datang. (Kemenperin, 2018)

Dalam rangka meningkatkan peran dan daya saing UMKM tersebut, pemerintah Indonesia melakukan pelatihan ketrampilan UMKM yang bekerjasama dengan Badan Latihan Khusus (BLK) dan Smesco, yang tersebar di daerah di 34 propinsi Indonesia, dan juga menyediakan total dana sejumlah 100 miliar rupiah yang dialokasikan untuk menopang seluruh kegiatan pelatihan tersebut dan dibagi rata untuk masing-masing propinsi (Liputan6, 2018).

Pada bulan Juli 2018 pemerintah juga memutuskan untuk menurunkan tarif pajak UMKM menjadi 0.5 persen (Kompas, 2018). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut pemerintah Indonesia dalam menjalankan upaya pengembangan UMKM dengan memberikan kredit usaha dengan bunga ringan melalui (LPDB) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (Liputan6, 2018), dan (KUR) Kredit Usaha Rakyat. Kredit usaha ini kemudian ditetapkan agar dapat diakses juga melalui bank umum dan lembaga keuangan *non*-bank yang terdaftar di OJK (Kompas, 2018).

Dengan adanya pengaruh globalisasi, peran UMKM kini tidak hanya dilihat pada lingkup yang terbatas. Bertambahnya kompetisi dari pelaku usaha asing dan dengan adanya kebijakan *FTA (Free Trade Area)* maka tingkat kompetensi atau daya saing UMKM menjadi kekuatan yang sangat krusial baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional.

Sejak tahun 2015, Indonesia sudah menjalani masa kesepakatan perdagangan bebas dalam lingkungan *ASEAN* yaitu MEA (Masyarakat Ekonomi *ASEAN*). Konsep dalam MEA ditujukan untuk mencapai empat pilar ekonomi untuk menjadikan kawasan *ASEAN* sebagai: (Rijanto, 2016)

1. kawasan basis produksi dan pasar tunggal
2. kawasan yang berdaya saing
3. kawasan yang mengedepankan pembangunan yang merata
4. kawasan yang terintegrasi dengan pasar global

Melalui MEA ini maka para pelaku UMKM dan pelaku usaha lainnya saling berlomba untuk mengambil pasar konsumen yang sama. Tingkat persaingan usaha di lingkungan *ASEAN* akan semakin tinggi dan mendorong adanya kesetaraan mutu yang dipersyaratkan sebagai solusinya. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk melindungi UMKM domestik dari persaingan internasional perlu didukung juga oleh peningkatan kualitas dari produk dan jasa yang ditawarkan UMKM, sehingga dapat diterima di pasar internasional. (Kompas, 2018)

Berdasarkan peringkat kualitas logistik dan infrastruktur negara-negara *ASEAN* pada Tabel 1.2. Indonesia masih perlu membenahi kualitas kinerja logistik dan juga meningkatkan infrastrukturnya untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Peringkat pertumbuhan ekonomi negara *ASEAN* untuk periode 2010-2014 berikut dengan angka pertumbuhan rata-rata ekonomi negara masing-masing ditampilkan pada Tabel 1.3. Berdasarkan data pada Tabel 1.3. tersebut Indonesia memiliki rata-rata pertumbuhan 5,8 persen per tahun, dan tingkat pertumbuhan rata-rata tersebut masih dipertahankan dan mencerminkan kondisi pada saat ini.

Tabel 1.2. Peringkat kualitas logistik dan infrastruktur di *ASEAN*

No	Country	Country Logistics Performance Index 2014*		Infrastructure Index (2015-2016)**	
		1-5 (worst to best)			
		Score	Rank	Score	Rank
1	Brunei Darussalam				
2	Cambodia	2.74	83	3.2	101
3	Indonesia	3.08	53	4.2	62
4	Lao PDR	2.39	131	3.2	98
5	Malaysia	3.59	25	5.5	24
6	Myanmar	2.25	145	2.1	134
7	Philippines	3.00	57	3.4	90
8	Singapore	4.00	5	6.5	2
9	Thailand	3.43	35	3.7	82
10	Vietnam	3.15	48	3.8	76

Sumber : *Logistic Performance index Report 2014;**Global Competitiveness Report 2015-201 yang dikutip dari Rijanto (2016)

Tabel 1.3. Peringkat pertumbuhan ekonomi negara-negara *ASEAN*

Negara	2010	2011	2012	2013	2014	*Average*
Brunei Darussalam	3	4	1	-2	-2	0.6
Filipina	8	4	7	7	6	6.2
Indonesia	6	6	6	6	5	5.8
Kamboja	6	7	7	7	7	7.0
Laos	8	8	8	8	8	7.9
Malaysia	7	5	6	5	6	5.8
Myanmar	10	6	7	8	9	7.9
Singapore	15	6	3	4	3	6.4
Thailand	8	1	7	3	1	3.9
Vietnam	6	6	5	5	6	5.9

Sumber: ADB (2015) dikutip dari Rijanto (2016)

Dalam rangka *monitoring* kebijakan UMKM di lingkungan *ASEAN*, seluruh negara anggota *ASEAN* sepakat menyusun '*ASEAN SME Policy Index'* untuk mengukur delapan indikator yang terkait dengan kebijakan UMKM. Indeks tersebut diadopsi dari metode penilaian kebijakan UMKM yang sudah dilakukan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).*

Walaupun indeks tersebut terkait dengan kebijakan domestik, '*ASEAN SME Policy Index'* dapat memberikan gambaran mengenai daya saing UMKM di negara-negara anggotanya. Data '*ASEAN SME Policy Index'* ditampilkan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. *ASEAN SME Policy Index*

No	Indikator	BRN	CAM	IND	LAO	MMR	MYS	PHL	SGP	THA	VNM	ASEAN
1	Institutional Framework	2.6	2.6	4.4	2.6	2.9	4.6	3.7	5.4	3.9	3.8	3.7
2	Access to Support Services	3.3	2.4	4.0	2.3	2.7	4.8	3.8	5.4	3.8	3.6	3.6
3	Cheaper and Faster Start up	3.1	2.1	4.4	2.7	2.9	4.8	3.0	5.0	4.2	4.1	3.6
4	Access to Finance	3.0	2.5	4.3	2.5	2.1	4.6	3.6	5.6	4.3	3.4	3.6
5	Technology and Technology Transfer	3.2	1.9	3.8	2.0	2.4	4.9	3.6	5.6	4.3	3.6	3.5
6	International Market Expansion	3.2	3.3	4.2	3.1	3.3	5.0	4.4	6.0	4.7	4.0	4.1
7	Promotion of Entrepreneurial Education	3.0	2.1	3.9	2.3	2.9	4.2	3.7	5.0	3.1	2.9	3.3
8	More effective representation of SME's interest	2.3	2.5	3.0	3.0	4.5	5.7	4.7	5.0	4.4	4.0	3.8

Sumber : ERIA (2014) dikutip dari Rijanto (2016)

Berdasarkan data pada Tabel 1.4. '*ASEAN SME Policy Index'* di atas terlihat bahwa Indonesia memiliki kelebihan disisi kebijakan mengenai pembentukan kerangka institusi dan memiliki fleksibilitas yang lebih baik untuk *"start up"* perusahaan. Di sisi lain Indonesia memiliki kelemahan dalam menetapkan tingkat suku bunga pinjam dan juga dalam transfer teknologi. Negara *ASEAN* yang memiliki kebijakan dan kompetensi tinggi antara lain Singapura dan Malaysia, sementara Indonesia menduduki peringkat ketiga dari keseluruhan negara lainnya.

Implikasi dari adanya aturan perdagangan yang semakin kompleks dan kondisi dinamika perekonomian global pada saat ini adalah meningkatnya kesulitan dan macam penyesuaian daya saing yang harus dilakukan oleh pelaku usaha secara global. Penyesuaian tersebut perlu diperhatikan baik oleh perusahaan besar, maupun perusahaan kecil dan menengah lainnya.

Untuk dapat meningkatkan daya saingnya, para pelaku usaha termasuk UMKM di Indonesia masih mengalami kendala-kendala klasik, seperti masalah birokrasi. Kendala yang diakibatkan oleh tingginya biaya dan kesulitan prosedural dalam mengurus perijinan usaha, dan juga dalam mengakses kredit usaha (Bellefleur et al., 2012). Dirangkum dalam wacana strategi nasional, pembiayaan dan permodalan usaha diidentifikasi sebagai salah satu kendala utama dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia (Rijanto, 2016).

Penyaluran kredit kepada UMKM yang masih rendah tidak hanya diakibatkan oleh minimnya peminat kredit dengan tingkat bunga pinjam yang tinggi, melainkan juga dapat terjadi karena keterbatasan pengetahuan dari pelaku UMKM sendiri. Rendahnya tingkat literasi keuangan *(financial literacy)* pada para pelaku UMKM menghambat akses kredit usaha yang sudah dibuka oleh pemerintah Indonesia. (CNN Indonesia, 2016)

Peraturan PBI No. 14/22/PBI/2012 berisi tentang ketentuan pemberian kredit pembiayaan oleh bank umum dan lembaga keuangan non-bank, serta bantuan teknis lainnya dalam rangka pengembangan UMKM di seluruh Indonesia. Peraturan ini menunjuk bahwa akses kredit tidak lagi terbatas penyalurannya (BI, 2018).

Berkaitan dengan kelonggaran kebijakan kredit pemerintah tersebut, maka muncul kewajiban berupa pedoman teknis yang sebaiknya diketahui oleh para pelaku UMKM. Beberapa diantaranya antara lain mengenai persyaratan Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK), dan prosedur pengembangan kapasitas UMKM baik yang dimiliki secara perorangan atau satu badan usaha. Bentuk PTK yang dimaksud antara lain; UMKM dianjurkan untuk memiliki pencatatan transaksi standar seperti neraca dan laporan laba rugi. (BI, 2018)

Terdapat empat jenis PTK yang disediakan dalam pedoman tersebut antara lain untuk UMK yang berbadan usaha pada sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan manufaktur, dan satu pedoman khusus untuk UMK Perorangan. Pencatatan ini digunakan sebagai persyaratan untuk membuka peluang kredit usaha yang disediakan oleh program pemerintah. (BI, 2018).

Pemerintah Indonesia menetapkan enam faktor yang dapat meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia, antara lain: (Rijanto, 2016)

1. SDM yang produktif dan inovatif
2. Kemudahan berusaha
3. Akses permodalan
4. Akses pasar (domestik dan internasional)
5. Infrastruktur, logistik, dan telekomunikasi
6. Siklus bisnis (diversifikasi pasar, meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi)

Setelah identifikasi enam faktor tersebut dalam menetapkan strategi kebijakan maka pemerintah Indonesia perlu memantau pelaksanaan kebijakan tersebut dan pada tahap selanjutnya mengevaluasinya.

Salah satu program strategis yang kini dijalankan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian rakyat, termasuk UMKM, adalah program literasi dan inklusi keuangan nasional. Masing-masing program nasional tersebut kemudian dimonitor perkembanganya melalui suatu angka yang disebut dengan indeks literasi keuangan dan indeks keuangan inklusif (IKI). (www.bi.go.id)

Indeks literasi keuangan merupakan suatu indeks yang merepresentasikan rata-rata pengetahuan dan ketrampilan keuangan pada masyarakat. Sementara indeks

keuangan inklusif merupakan suatu indeks dimana akses atas produk dan jasa keuangan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedua indeks ini memiliki keterkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, perkembangan industri keuangan, dan manajemen keuangan pribadi *(personal finance).*

Berkembangnya industri jasa keuangan pada masa kini juga mendorong tingkat penyerapan inklusi keuangan di berbagai negara. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya produk jasa keuangan yang ditawarkan, dan juga meningkatnya gaya hidup masyarakat modern. Meskipun demikian, inklusi keuangan saja tidak menjamin bahwa masyarakat akan cepat sampai pada kondisi *financial well-being.*

Perekonomian nasional yang meningkat diikuti oleh daya beli konsumen yang tinggi telah menciptakan iklim inklusi keuangan yang subur bagi para penyedia jasa keuangan. Atas dasar situasi tersebut maka setiap individu yang hidup pada masa kini tidak dapat terlepas dari pilihan untuk dapat mempelajari dan menguasai produk-produk keuangan secara lebih baik (Lusardi dan Mitchell, 2014).

Pengetahuan keuangan *(financial knowledge)* dan ketrampilan keuangan *(financial skills)* yang tinggi dipercaya akan memberi dampak positif pada tingkat kemampuan berinvestasi dan pengambilan keputusan keuangan yang cerdas pada seorang individu. (Lusardi dan Mitchell, 2014 : Kurihara, 2013 : Cole et al., 2009)

Program literasi keuangan adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyrakat dalam mengelola keuangan pribadinya dan mencapai kesejahteraan finansial, dan dengan demikian dapat mengantisipasi krisis ekonomi akibat manajemen keuangan yang buruk di masa datang. Literasi keuangan mulai menjadi perhatian dikala krisis ekonomi global pada tahun 2008, yang dipicu oleh kasus *subprime mortgages* dimana terjadi pembengkakan risiko kredit yang sangat tinggi yang kemudian berakibat pula pada risiko likuiditas di pasar finansial.

Subprime mortgage merupakan istilah pemberian kredit perumahan kepada kalangan masyarakat yang sebenarnya tidak layak diberikan kredit. Hal ini kemudian juga berlanjut pada penemuan bahwa masih banyak masyarakat Amerika yang memiliki tingkat literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan yang rendah.

Literasi keuangan yang rendah tersebut menyebabkan keputusan keuangan yang buruk dan masalah ekonomi lainnya.

Pengembangan kualitas hidup masyarakat merupakan beban negara yang harus ditanggapi dengan kesiapan yang matang dalam segi kebijakan dan juga biaya. Sementara itu, program literasi keuangan merupakan salah satu program intervensi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan masyarakat dan tentunya meningkatkan keuangan inklusif dengan biaya yang rendah. (Cole et al., 2009)

Program literasi keuangan secara nasional di Indonesia dimulai sejak tahun 2013. Diawali dengan penemuan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah, yaitu di 21,6 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk hanya didapati sekitar 22 orang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi *(well-literate)*. Dengan penemuan tersebut maka pemerintah Indonesia mengikuti jejak negara lain dan meluncurkan cetak biru literasi keuangan Indonesia pada tanggal 19 November tahun 2013.

Peluncuran dan pencanangan cetak biru literasi keuangan tersebut sekaligus juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan komponen program literasi keuangan Indonesia sebagai berikut; mobil literasi keuangan "Si Molek" sebagai maskot kampanye, "SIKAPI Uang dengan Bijak" sebagai jargon kampanye, serta *mini website* dan *financial customer care* di nomor 021-500 655 yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat yang membutuhkannya (Okezone, 2013).

Program literasi keuangan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai keuangan kepada masyarakat dan melakukan gerakan sadar finansial. Dilansir dalam media *online*, Presiden Indonesia saat itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar sistem keuangan Indonesia dapat berjalan dengan aman di tengah gejolak global dan tetap berkontribusi terhadap ekonomi domestik.

Ketiga hal yang dimaksud antara lain: (Okezone, 2013)

1. Industri keuangan harus tetap menguat
2. Masyarakat harus mengetahui dan menggunakan jasa keuangan tersebut

3. Negara harus memastikan sistem keuangan aman dan tidak mudah terguncang meski di tengah gejolak dunia

Program literasi keuangan yang dituangkan dalam (SNLKI) Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2013 tersebut disusun oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Indonesia bersama Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan dari seluruh industri keuangan baik perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, pegadaian, dan dana pensiun.

Dalam SNLKI 2013 terdapat strategi tiga pilar yang ditujukan untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan. Ketiga pilar tersebut adalah:

1. Program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan
2. Penguatan infrastruktur literasi keuangan
3. Pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau

Kebijakan dalam SNLKI pertama yang dibuat tahun 2013 ini kemudian dipakai menjadi pedoman OJK dalam melaksanakan peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan khususnya terkait dengan usaha peningkatan literasi keuangan. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan dengan himbauan berupa penyelenggaraan edukasi keuangan bagi perusahaan penyedia produk dan layanan jasa keuangan.

Kegiatan edukasi yang dimaksud antara lain:

- Implementasi pendidikan keuangan yang meliputi pendidikan mengenai:
    - Perencanaan dan pengelolaan keuangan
    - Industri keuangan
    - Fitur baik keuntungan dan risiko dari produk/ jasa keuangan
    - Perpajakan terkait dengan transaksi produk/jasa keuangan
- Implementasi atas sistem informasi database dan program literasi yang berkelanjutan pada organisasi penyedia produk/ jasa keuangan.
    - Setiap perusahaan penyedia produk/ jasa keuangan diwajibkan memiliki perencanaan, implementasi dan evaluasi atas aktivitas program literasi keuangan dan keuangan inklusif pada organisasinya yang dilaporkan setiap tahun.

Dengan melibatkan para pelaku industri jasa keuangan dalam program edukasi keuangan masyarakat tersebut, pemerintah mengharapkan adanya akselerasi pada proses peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan yang ditetapkan.

Peraturan-peraturan lainnya yang mengikuti program literasi keuangan adalah Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Melalui peraturan dan kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan indeks literasi dan inklusi keuangan tahun 2019 masing-masing di 35 persen dan 75 persen. (OJK, 2017)

Pada tahun 2016 OJK mengevaluasi hasil dari program strategis yang ditetapkan dalam SNLKI 2013 dan menghasilkan rumusan yang disempurnakan dalam *Revisit* SNLKI. Pembaruan ini dicatat pada Pasal 2 dan Pasal 11 dalam Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

POJK Literasi dan Inklusi Keuangan dalam *Revisit* SNLKI ini dijadikan sebagai pedoman untuk memantau pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada saat ini bagi OJK, lembaga jasa keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya POJK Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 ini sebagai pedoman yang terbaru maka POJK No. 1/POJK.07/2013 dicabut pemberlakuannya (OJK, 2017)

Penyesuaian dalam *Revisit* SNLKI 2017 menunjukan bahwa literasi keuangan masih rendah sehingga kegiatan edukasi keuangan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi serta perkembangan produk layanan jasa keuangan yang semakin kompleks di masa yang akan datang mengakibatkan kebutuhkan literasi keuangan yang memadai semakin meningkat.

Dalam *Revisit* SNLKI terdapat beberapa hal yang tidak terdapat pada SNLKI sebelumnya seperti informasi terkait literasi dan inklusi keuangan syariah, layanan keuangan digital dan perencanaan keuangan. Perbedaan lain yang terdapat antara SNLKI 2013 dan *Revisit* SNLKI adalah pada visi, sasaran, tema prioritas, dan program strategis. (OJK, 2017)

Visi dalam *Revisit* SNLKI adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi *(well-literate)* sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan berkelanjutan *(financial well-being)*. Masyarakat *financial well-being* yatu masyarakat yang mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, memiliki kemampuan dalam berinvestasi serta memiliki ketahanan keuangan. Sementara visi SNLKI 2013 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi *(well-literate)* sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan atau keyakinan untuk memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan. (OJK, 2017)

Sasaran kegiatan literasi dan inklusi keuangan pada *Revisit* SNLKI semakin luas dengan menambahkan sasaran pemuda, sasaran penyandang disabilitas, masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar, TKI (tenaga kerja Indonesia) dan calon TKI, petani dan nelayan serta mengubah penyebutan ibu rumah tangga menjadi perempuan. Sementara sasaran SNLKI 2013 meliputi ibu rumah tangga, UMKM, pelajar/ mahasiswa, karyawan, profesi, dan pensiunan. (OJK, 2017)

Tema prioritas pada *Revisit* SNLKI tidak lagi ditentukan langsung dalam beberapa tahun ke depan namun akan ditentukan oleh OJK yang berkolaborasi dengan industri jasa keuangan di akhir tahun berdasarkan pada program pemerintah dan hasil evaluasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan. (OJK, 2017)

Program strategis utama dalam kerangka dasar *Revisit* SNLKI terdiri dari tiga program utama yaitu cakap keuangan, sikap dan perilaku keuangan yang bijak, dan akses keuangan. Selanjutnya ketiga program strategis pada *Revisit* SNLKI tersebut dituangkan dalam bentuk inisiatif yang keseluruhannya berjumlah enam program. Masing-masing program inisiatif diuraikan secara konkrit dalam bentuk rencana kegiatan *(core action)* yang dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan sebagaimana telah diatur dalam POJK Literasi dan Inklusi Keuangan.

Program strategis utama dalam kerangka dasar *Revisit* SNLKI ditampilkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Program Strategis dalam *Revisit* SNLKI 2017
Sumber : *Revisit* SNLKI (2017)

Diluar dari kontekstual strategi literasi keuangan nasional yang bersifat pedoman pelaksanaan program strategis tersebut maka penyusunan *Revisit* SNLKI ini juga dibuat untuk mengakomodasi perkembangan konsep literasi dan inklusi keuangan terkini dari *best practises internasional* seperti *OECD, World Bank, Alliance for Financial Inclusion (AFI),* dan G-20. (OJK, 2017)

Alur implementasi strategi literasi dan inklusi keuangan untuk Indonesia oleh OJK seperti ditampilkan pada Gambar 1.2.

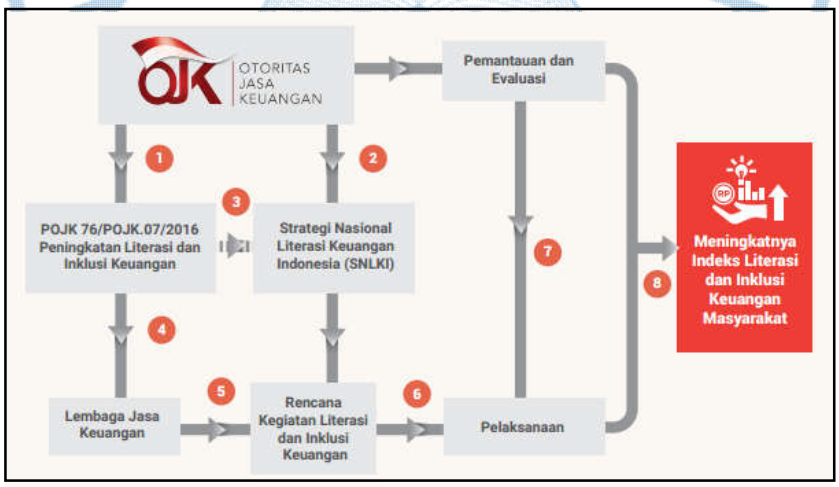

Gambar 1.2. Alur implementasi *Revisit* SNLKI
Sumber: OJK (2017)

Pemerintah Indonesia menganggap bahwa program literasi keuangan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas inklusi keuangan. Dengan adanya perbaikan pada kondisi

literasi keuangan diharapkan dapat menstimulasi penyerapan/ peningkatan pada aktivitas inklusi keuangan pada masyarakat. Berdasarkan survei nasional mengenai literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013 dan 2016 menunjukan bahwa tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia sudah cukup tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan literasi keuangannya.

Data-data mengenai hasil survei literasi dan inklusi keuangan nasional yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013 dan 2016 terdapat pada Tabel 1.4.-1.8. yang dicantumkan pada Lampiran A-1. Sementara angka perbandingan pada tingkat literasi dan inklusi keuangan hasil survei nasional dapat dilihat pada Gambar 1.3.

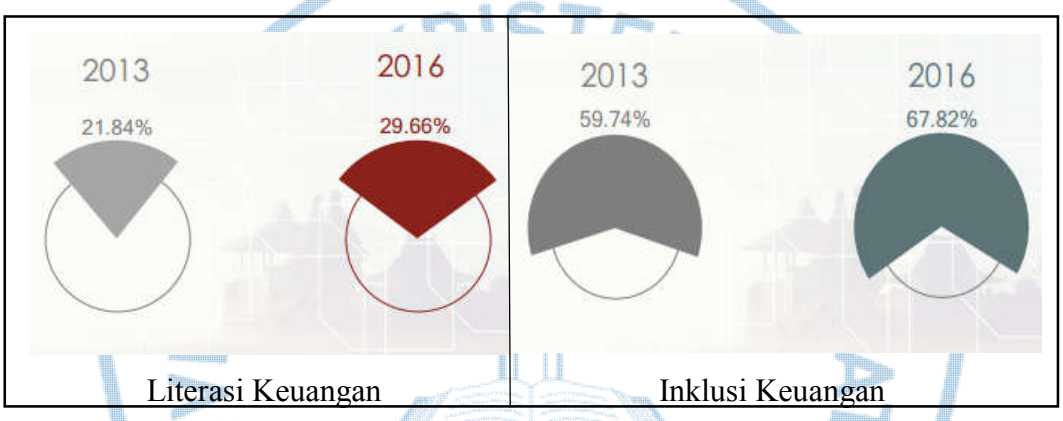

Gambar 1.3. Hasil survei nasional tingkat literasi dan inklusi keuangan oleh OJK
Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016, OJK

Pertumbuhan inklusi keuangan yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan literasi keuangan dapat menimbulkan masalah baru. Seperti ditampilkan pada Gambar 1.4. maka pertumbuhan ekonomi yang sedang kuat perlu diikuti juga dengan literasi dan inklusi keuangan yang meningkat.

Kondisi tingkat literasi keuangan nasional masih rendah tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia pada saat ini mungkin belum terpengaruhi oleh kondisi inklusi keuangan secara sepenuhnya. Kondisi yang unik ini mungkin menjadi karakteristik ekonomi yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Dengan demikian, inklusi keuangan juga dapat dijadikan indikator pembanding untuk melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

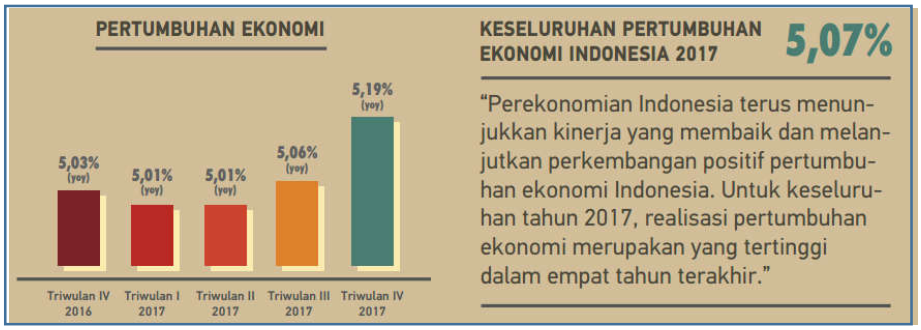

Gambar 1.4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017

Sumber: Bank Indonesia (2018)

Menurut *World Bank*, setidaknya ada empat layanan keuangan vital yang secara umum diperlukan oleh masyarakat, yaitu: (1) penyimpanan dana, (2) layanan kredit, (3) layanan sistem pembayaran, dan (4) asuransi termasuk dana pensiun. Keempat aspek dalam lingkup pengelolaan sistem keuangan ini menjadi prasyarat mendasar untuk menggapai kehidupan masyarakat yang lebih baik (BI, 2011).

Akses layanan keuangan yang mudah dan terjangkau sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, termasuk UMKM. Pertumbuhan ekonomi juga dapat didorong dengan adanya pemanfaatan sektor jasa keuangan pada perekonomian masyarakat. Hal ini menjadi esensi utama dari kegiatan inklusi keuangan yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia sehingga dapat membantu pemerintah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. (BI, 2011)

Hubungan aktivitas inklusi keuangan terhadap literasi keuangan terletak pada pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap perencanaan keuangan dan memanfaatkan produk layanan jasa keuangan tersebut. Sementara, implikasi dari kebijakan inklusi keuangan ini adalah perhatian pemerintah terhadap perekonomian masyarakat menjadi bertumpu pada dua hal, yaitu: akses layanan keuangan kepada pelaku usaha, dan sinergi antara lembaga keuangan (bank dan *non*-bank).

Dengan adanya kampanye kesadaran finansial dan sosialisasi yang dijalankan maka tindak laku penipuan *(fraud)* pada lingkungan organisasi penyedia jasa keuangan diharapkan akan berkurang. Untuk mendukung kelancaran dari program kebijakan tersebut maka pemerintah juga perlu menciptakan suatu keseimbangan peraturan mengenai penggunaan inklusi keuangan dalam bidang ekonomi.

Perubahan strategi bisnis yang tidak diimbangi oleh penyesuaian kebijakan yang tepat akan menimbulkan masalah sosial bagi pelaku ekonomi tertentu, misalnya pada kasus transportasi *online* yang terjadi belakangan ini. Permasalahan yang terjadi pada transportasi *online* tersebut disebabkan mahalnya biaya transportasi umum konvensional dibandingkan dengan transportasi *online* yang menyebabkan hilangnya omset bagi pengusaha transportasi konvensional.

Kondisi teknologi dan inklusi keuangan yang berkembang tentu saja akan sulit untuk dihindari, akan tetapi permasalahan yang mungkin muncul akibat adanya perubahan tersebut juga tidak dapat diabaikan dan perlu diselesaikan secara bijaksana. Melalui program literasi keuangan yang dilakukan maka diharapkan setiap individu diarahkan untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan keuangannya sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya pada saat itu, dan memiliki cukup pengetahuan untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian ekonomi di masa datang.

Peningkatan atas literasi dan inklusi keuangan juga dipercaya dapat mendorong pertumbuhan UMKM di negara tersebut. Literasi keuangan yang baik bagi UMKM ditandai dengan kemampuan untuk memahami konsep dasar dari produk/ jasa keuangan, melakukan perencanaan anggaran, dan mengelola keuangan secara lebih baik. Dengan demikian, peningkatan pada literasi dan inklusi keuangan tersebut juga dapat mendukung sasaran jangka panjang perekonomian nasional, yaitu untuk mencapai perekonomian nasional yang mapan. (OECD, 2018)

Lingkup perkembangan ekonomi mikro telah menjadi suatu hal yang penting di tengah pergolakan ekonomi global saat ini. Adanya kondisi pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada negara-negara yang lebih maju menyebabkan pergeseran siklus ekonomi dari negara maju kepada negara-negara berkembang. Dengan kondisi tersebut maka ekonomi mikro menduduki posisi yang penting karena perannya sebagai roda utama penggerak ekonomi nasional, seperti yang terjadi di Indonesia dan negara berkembang lainnya. (Deresky, 2017: 26)

Potensi UMKM di Indonesia sangat besar, dilihat dari besarnya angka populasi penduduk yang dimiliki serta persebarannya di seluruh kepulauan yang dimiliki Indonesia. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi kemudian juga menciptakan

pasar yang subur untuk perekonomian jangka panjang. Dengan demikian, selama populasi penduduk Indonesia terus bertumbuh maka populasi UMKM juga akan terus bertambah banyak (Kompas, 2018).

Meskipun demikian, pertumbuhan UMKM di Indonesia dipandang cukup lambat pertumbuhannya. Untuk mengupayakan pertumbuhan UMKM tersebut dapat meningkat hingga lima persen pada tahun 2019 maka pemerintah Indonesia juga kemudian mengejar pertumbuhan UMKM di daerah yang jauh dan terpencil (Kompas, 2018).

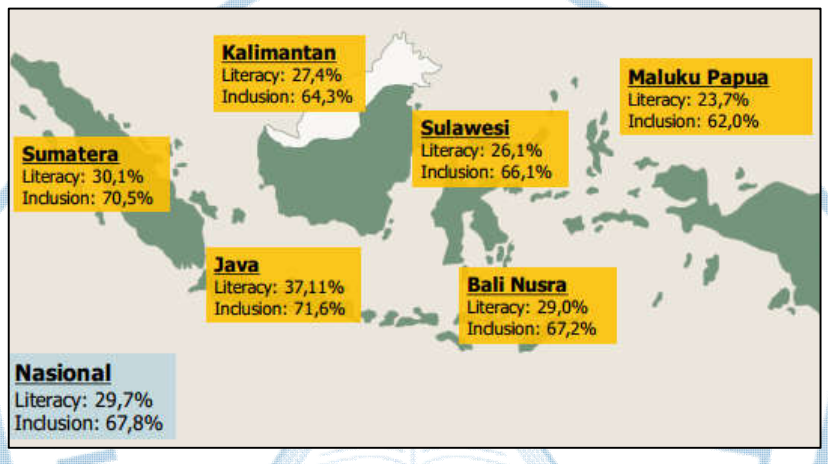

Gambar 1.5. Survei literasi dan inklusi keuangan daerah Indonesia tahun 2016
Sumber: Revisit SNLKI (2017)

Berdasarkan hasil survei literasi dan inklusi keuangan daerah Indonesia pada tahun 2016 yang ditampilkan pada Gambar 1.5. maka persebaran tingkat inklusi keuangan terlihat hampir merata untuk seluruh pulau di Indonesia. Meskipun demikian, kondisi literasi keuangan yang lebih baik masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera.

Literasi keuangan di kalangan UMKM yang masih rendah di Indonesia dianggap sebagai kendala utama bagi UMKM untuk mendapat akses kredit usaha. Hal ini disebabkan oleh banyaknya UMKM yang tidak memiliki sistem pencatatan keuangan secara formal (Bellefleur et al., 2012).

UMKM yang tidak menjalankan pencatatan transaksi secara formal tersebut biasanya akan memiliki permasalahan dalam penyusunan anggaran dan tidak

memiliki persiapan yang cukup dalam menghadapi krisis keuangan. Sementara di lain pihak, permasalahan kredit usaha yang macet juga akan menjadi risiko yang tidak diharapkan bagi pihak pemberi kredit. Dengan demikian, maka regulasi yang tepat sangat dibutuhkan.

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM pada saat ini adalah bagaimana untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dan meningkatkan daya saingnya (Kurihara, 2013). Oleh karena itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk UMKM dipercaya menjadi salah satu bentuk solusi dalam upaya meningkatkan peran dan produktivitas UMKM di perekonomian global pada saat sekarang dan masa yang akan datang.

Literasi keuangan memiliki hubungan yang erat dengan konsep *financial well-being* yang berlaku bagi indvidu, dan konsep pendidikan keuangan akan sangat mempengaruhi perkembangan literasi keuangan. Hal ini dibuktikan pada penelitian terdahulu diantaranya keuangan Fan dan Chatterjee (2018), Isomidinova dan Singh (2017), Sucuahi (2013) yang mengatakan bahwa pendidikan keuangan memberi pengaruh terbesar pada peningkatan pengetahuan keuangan, sementara konsep *financial well-being* tersebut mempengaruhi tingkat literasi keuangan.

Literasi keuangan juga berkaitan dengan pola pengambilan keputusan keuangan, dan dorongan untuk mengambil keputusan berinvestasi. Pemberian pelatihan/ kursus ketrampilan keuangan yang terarah akan menghasilkan inisiatif dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih baik (Kurihara, 2013).

Pendidikan keuangan merupakan suatu proses pembentukan akan pemahaman keuangan yang juga dipengaruhi oleh agen sosialisasi keuangan, seperti orang tua dan rekan sejawat (Senevirathne et al, 2016). Hasil dari pendidikan keuangan ini adalah pengetahuaan keuangan dan perilaku keuangan yang mendasari keputusan keuangan yang juga akan terus berkembang sesuai dengan perubahan usia dan situasi kebutuhannya pada saat itu.

Perkembangan pengetahuan dan perilaku keuangan individu ikut dipengaruhi oleh interaksi sosialnya dengan lingkungan dimana ia tinggal. Seringkali nilai-nilai yang terbentuk secara bersama-sama tersebut dapat mempengaruhi keputusan keuangan seorang individu.

Motivasi dan kehendak pribadi dalam seorang individu dapat juga menentukan bagaimana individu tersebut bersikap dan meresponi atas suatu permasalahan keuangan. Secara umum, sikap terhadap uang *(money attitude)* seorang individu akan mengarahkan kepada perilaku keuangan yang sejalan. Jika *money attitude*-nya positif maka seorang individu akan mampu untuk bekerja secara independen dan mencapai tujuan finansialnya. Sebaliknya jika *money attitude*-nya negatif, maka biasanya individu tersebut cenderung akan mengalami masalah keuangan atau kegagalan dalam kehidupannya. (Taneja, 2012; Tang, 2014)

Dengan demikian, aspek sikap dan perilaku keuangan individu tersebut secara teori dapat mempengaruhi kualitas literasi keuangan, yang kemudian berdampak pada keputusannya pada inklusi keuangan. Penelitian ini mengambil fenomena yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu bagaimana untuk meningkatkan inklusi keuangan UMKM dengan menganalisa kondisi literasi keuangannya.

Model penelitian literasi keuangan dengan pengaruh tiga faktor determinan, yaitu; pendidikan, agen sosialisasi keuangan, dan sikap terhadap uang *(money attitude)* pernah dilakukan oleh Albeerdy dan Gharleghi (2015), dan Isomidinova dan Singh (2017). Mengembangkan dari model penelitian tersebut, yaitu dengan menambahkan masalah inklusi keuangan UMKM di Indonesia maka penelitian ini mengambil judul:

"Pengaruh Pendidikan, Agen Sosialisasi, dan *Money Attitude* Terhadap Literasi Keuangan dan Dampaknya Pada Inklusi Keuangan UMKM di Bandung."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Bagaimanakah kondisi literasi dan inklusi keuangan UMKM di Bandung?
2) Apakah pendidikan keuangan mempengaruhi literasi keuangan UMKM di Bandung?
3) Apakah agen sosialisasi keuangan mempengaruhi literasi keuangan UMKM di Bandung?

4) Apakah *money attitude* mempengaruhi literasi keuangan UMKM di Bandung?
5) Apakah literasi keuangan mempengaruhi inklusi keuangan UMKM di Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kondisi dan pengaruh dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1) Menganalisa kondisi literasi dan inklusi keuangan UMKM di Bandung.
2) Menganalisa kondisi pendidikan keuangan dan pengaruhnya pada literasi keuangan UMKM di Bandung.
3) Menganalisa kondisi sosialisasi keuangan dan pengaruh agen sosialisasi keuangan pada literasi keuangan UMKM di Bandung.
4) Menganalisa kondisi *money attitude* serta pengaruhnya pada literasi keuangan UMKM di Bandung.
5) Menganalisa kondisi literasi keuangan dan pengaruhnya pada inklusi keuangan UMKM di Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan khususnya kepada:

a) Bidang penelitian dan akademis, yaitu sebagai tambahan wawasan dalam melihat perkembangan ekonomi mikro, terutama potensi UMKM di kota Bandung, dan sebagai bahan perbandingan untuk melanjutkan penelitian mengenai literasi dan inklusi keuangan lainnya.
b) Pihak pemilik atau pengelola UMKM, yaitu sebagai sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kinerja dan daya saingnya terutama pada penerapan manajemen keuangan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembagian pembahasan maka penulisan tesis ini dibagi menjadi enam bab. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pembagian bab beserta isinya:

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian berupa fenomena atau permasalahan ekonomi yang terjadi sehingga mendorong dilakukannya penelitian ini. Bab ini juga berisi mengenai identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Teori dan konsep yang disusun tersebut disarikan dari beberapa sumber dan hasil dari penelitian terdahulu.

Bab III : RERANGKA PEMIKIRAN, MODEL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini berisi rerangka pemikiran, model penelitian dan hipotesis penelitian.

Bab IV : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian dan operasionalisasi variabel.

Bab V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan implikasi manajerial.

Bab VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi penelitian selanjutnya.